

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang telah menjadi pemenang dalam perang dunia II, sehingga memiliki hak untuk menjadi pengatur keamanan dunia dengan mengatasmakan Dewan Keamanan Internasional. Negara tersebut memiliki setidaknya luas wilayah 9.83 juta km² dengan ibukota yang terletak di Washington D.C. Amerika Serikat dikenal juga sebagai bangsa yang menganut paham Liberalisme yang mencakup demokrasi sebagai sistem politik, kapitalisme sebagai sistem ekonomi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal ini mengakibatkan Liberalisme mampu membentuk masyarakat yang individualistis (Pareanom, 2005). Adanya pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari George W. Bush kepada Barack Obama menjadi fenomena baru, karena baerasal dari kulit hitam di Amerika Serikat. Kebijakan dari Bush yang terkenal keras karena dari partai Republik, berbeda dari senator Obama dari Partai Demokrat yang lebih mengedepankan adanya diplomasi (Muna, 2009, hal. 86-87).

Barack Husein Obama sendiri merupakan seorang politisi yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang dapat menduduki jabatan sebagai presiden di Amerika Serikat. Barack Husein Obama sendiri lahir di Honolulu, Hawaii dari seorang ibu yang bernama Stanley Ann Dunham yang lahir di Wichita, Kansas dengan seorang ayah yang bernama Barack Obama, Sr dari seorang anggota suku Luo di Nyang'oma Kogelo, Kenya. Obama sendiri merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat dimana dia menjadi presiden. Pada awalnya ia merupakan seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapatkan gelar hukumnya. Sempat bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak tahun 1992 sampai 2004.

Dengan berakhirnya Perang Dunia II yang dimenangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, telah membuka babak baru dalam sejarah politik yang ada di Korea. Dengan impian dan cita-cita sebagai negara yang berdaulat dan mandiri, Korea menjadi negara yang berada pada kontrol oleh negara-negara yang menjadi pemenang perang dunia II terutama Amerika Serikat (Mas'ood & Yoon, 2003). Korea sendiri terbagi menjadi dua yaitu Utara dibawah kuasa Uni Soviet dan Selatan oleh Amerika Serikat pada masa terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Adanya pemisahan tersebut, menjadi awal mula pengenalan teknologi nuklir bagi Korea Utara oleh Uni Soviet. Sehingga Amerika Serikat merasa waswas dengan hadirnya pengembangan nuklir disana dan hingga sekarang selalu tidak mampu memiliki hubungan baik diantara keduanya.

Dalam pembagian antara Korea Utara dengan Korea Selatan, kerap kali menimbulkan konflik. Perang yang akhirnya terjadi diantara kedua negara pun terwujud yang dimulai sejak tanggal 25 Juni 1950, dan terhenti tiga tahun setelahnya dengan gencatan senjata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua negara sampai sekarang ini masih belum melakukan penandatanganan perjanjian perdamaian. Sehingga kedua negara secara resmi masih dalam keadaan bermusuhan atau perang. Sempat diadakan perjanjian perdamaian, namun dengan segala usaha yang telah dilakukan selalu mengalami jalan buntu. Dari awal konflik dengan Korea Selatan tersebut, Korea Utara melalui program nuklir yang didapat dari Uni Soviet mulai dikembangkan lebih maju. Sehingga program senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara akan mereka gunakan sebagai alat bargaining di percaturan internasional. Selain itu juga sebagai alat pertahanan jika sewaktu-waktu mendapatkan ancaman dari musuhnya, terutama terhadap Amerika Serikat.

Adanya perjanjian antara Korea Selatan dengan Korea Utara pada tahun 1953 yaitu perjanjian gencatan senjata, menjadikan Korea Utara merasa tidak aman dan terancam dengan adanya pemusatan kekuatan militer Amerika Serikat

yang ditempatkan di Korea Selatan. Sehingga memotivasi pemimpin Korea Utara Kim Il-sung untuk melanjutkan program nuklirnya sendiri dengan bantuan Uni Soviet dan China tahun 1964-an. Korea Utara baru ikut menandatangani perjanjian *Nuclear Non-Proliferation* (NPT) pada tahun 1985 untuk menutupi kekhawatiran Internasional terhadap pengembangan nuklir disana. Namun, dengan adanya penarikan diri Korea Utara dari perjanjian tersebut pada tahun 1993 (Tempo.co, 2017), memunculkan polemik baru dari reaksi dunia khususnya Amerika Serikat yang sangat menentang dan mengecam atas apa yang Korea Utara putuskan. Krisis nuklir Korea Utara berlangsung terus menerus hingga sekarang ini, sehingga Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan penjaga keamanan dunia, melalui politik luar negerinya, Amerika Serikat berusaha untuk bisa mengambil langkah agar Korea Utara bisa mengikuti hukum internasional yang ada terkait aturan-aturan bagi setiap negara yang memiliki teknologi nuklir.

Segala upaya yang telah dilakukan dunia internasional, seperti Dewan Keamanan PBB yang telah terhitung beberapa kali harus mengeluarkan resolusi untuk Korea Utara dalam memberikan sanksi yang serius jika Korea Utara masih memiliki dan mengembangkan program senjata nuklirnya. Selama ini Korea Utara menganut ideologi Juche, yaitu percaya kepada kekuatan sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa Korea Utara menutup diri dari dunia terkait kerjasama antar negara. Pada saat ini terlihat bahwa Korea Utara hanya memiliki hubungan baik dengan beberapa negara saja seperti Tiongkok dan Rusia.

Sebagai negara adikuasa dan memiliki bargaining position di mata dunia, Amerika Serikat termasuk negara yang sering mengalami kewalahan dalam menghadapi program pengembangan nuklir yang dimiliki Korea Utara. Dari awal Amerika Serikat mengetahui adanya pengembangan nuklir di Korea Utara melalui citra satelit mereka, kemudian dilakukannya serangkaian diplomasi serta kebijakan lainnya agar Korea Utara menghentikan program nuklir yang

dimilikinya. Walaupun seringkali mengalami kemajuan dalam menjalin perjanjian, namun seringkali juga terjadi konflik yang tidak sesuai diantara Korea Utara dengan Amerika Serikat atau negara- negara yang ada di sekitarnya seperti Korea Selatan dan Jepang.

Serangkaian uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara kerap kali membuat khawatir dunia internasional. Terkhusus negara yang berdekatan dengan Korea Utara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Amerika Serikat sebagai sekutu dari negara Jepang dan Korea selatan tidak dapat tinggal diam ketika negara sahabatnya terancam. Dilakukannya serangkaian diplomasi dan tekanan, bahkan pemberian sanksi terhadap Korea Utara, namun tetap saja Korea Utara tidak begitu memperdulikan tekanan yang diberikan Amerika Serikat dan dunia Internasional. Pada masa kepemimpinan Amerika Serikat Presiden Barack Obama, telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghadapi program nuklir Korea Utara. Dengan tujuan agar Korea Utara melakukan denuklirisasi dan menghentikan program pengembangan senjata nuklir yang dimilikinya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Barack Obama terhadap pengembangan senjata nuklir Korea Utara?”**

C. Landasan Teoritik

1. Politik Luar Negeri

Memiliki pengertian dasar yaitu *action theory* atau kebijaksanaan suatu negara terhadap negara lain untuk suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian secara teori, Politik Luar Negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar dari negaranya. Sehingga Politik Luar Negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang biasa disebut kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005, hal. 47-48).

Menurut Holsti (1988), sebagaimana yang dikutip dalam Perwita dan Yani (2005), tindakan kebijakan yang ada pada politik luar negeri dapat dibedakan menurut sarana yang digunakan, yaitu:

- 1) Diplomasi, merupakan upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingannya tersebut, ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu terhadap pemerintah negara lain. Pada hakikatnya, merupakan proses negosiasi dimana setiap negara melakukan tawar-menawar dalam suatu isu demi mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal melalui jalan yang resmi dan telah mencapai kesepakatan.
- 2) Propaganda, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk memberikan pengaruhnya terhadap perilaku dan opini publik negara

- lain, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah suatu negara yang melakukan propaganda.
- 3) Ekonomi, merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi tercapainya tujuan nasionalnya, yang mana bentuk dari manipulasi tersebut dapat berupa imbalan (*rewards*) maupun dengan paksaan (*coercion*). Sebagai paksaan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah negara lain untuk mengubah kebijakan-kebijakannya baik dalam domestik maupun luar negeri. Dalam sarana imbalan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah negara lain melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan oleh negara yang memberikan imbalan.
 - 4) Militer, merupakan upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan atau dukungan militer.

Dalam mempelajari politik luar negeri, alangkah baiknya mengetahui pengertian dasarnya, yaitu merupakan teori kebijakan atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai tujuan tertentu. Politik Luar Negeri juga merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sarana untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005, hal. 47).

Krisis nuklir yang ada di Semenanjung Korea merupakan isu yang sudah lama ada dan sampai saat ini masih belum dapat ditemukan titik penyelesaian yang berarti. Aktor-aktor internasional diperlukan dalam penanganan isu tersebut, salah satunya negara Amerika Serikat sebagai negara penjaga keamanan dunia. Dengan sarana yang telah dipaparkan oleh Holsti (1988) dalam bukunya Perwita dan Yani (2005), Amerika Serikat melakukan serangkaian cara untuk menghadapi isu yang semakin mengkhawatirkan di

Semenanjung Korea. Mulai dari diplomasi hingga sarana militer akan digunakan untuk menghadapi Korea Utara yang semakin sulit dalam menghentikan program senjata nuklirnya.

Tujuan dari dikeluarkannya sebuah kebijakan luar negeri menurut Rosenau (1969) dalam jurnal Yanyan Mochamad Yani (2007), merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dibedakan atas tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun pada dasarnya, negara memiliki tujuan jangka panjang, yaitu untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan (Yani, 2007, hal. 5). Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan serta kondisi dimasa depan suatu negara, yang mana pemerintah melalui para perumus kebijakan nasional mampu meluaskan pengaruhnya terhadap negara-negara lain, baik itu dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Dilihat dari sifatnya, dapat bersifat konkret dan abstrak, sedangkan dari segi waktunya dapat bertahan lama dalam periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, hal tersebut berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu (Yani, 2007).

Dalam kebijakan yang dimiliki Amerika Serikat masa Obama, tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan jangka panjang, dimana ada keinginan ingin tercapainya sebuah keamanan di Semenanjung Korea dan menciptakan perdamaian tanpa adanya konflik atau peperangan.

D. Hipotesa

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah penulis uraikan, Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama mengeluarkan beberapa kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Melakukan Strategi Kesabaran (*Strategic Patience Approach*)
2. Menjatuhkan Sanksi Terhadap Korea Utara

E. Metode Penelitian

1) Metode Pengumpulan Data

Kita sering mengetahui bahwa sebagian besar dalam ilmu sosial memiliki banyak aspek dan teknik dalam pengumpulan data maupun cara menganalisis yang bisa digunakan. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dari studi pustaka (*library research*). Melalui studi pustaka ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, koran, majalah baik dari media cetak maupun elektronik. Penulis mencoba untuk memahami dan menganalisa pokok masalah dalam penelitian ini berdasarkan sumber-sumber tersebut, sehingga akan menghasilkan informasi yang akurat dan nantinya dapat menjawab pertanyaan tersebut.

2) Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan memahami fakta. Diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek analisa. Kemudian fakta-fakta tersebut dirubah menjadi generalisasi empiris. Dari generasi empiris inilah mulai dilakukan perumusan konsep, perumusan dan perangkaian preposisi, dan kemudian akan diubah menjadi induksi teori.

F. Tujuan Penelitian

Dari penulisan skripsi dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Presiden Barack Obama Terhadap Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara Tahun 2009-2016” maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui strategi kebijakan apa yang diambil Amerika Serikat masa Presiden Barack Obama terhadap krisis nuklir yang terjadi di Korea Utara.

G. Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian pada penelitian ini adalah dari tahun 2009 sampai tahun 2016, dimana merupakan masa Barack Obama menjadi presiden di Amerika Serikat. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mencantumkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan namun diluar waktu tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, keangka teori, aplikasi teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan mengenai Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dan faktor yang mendukung kekuatannya.

BAB III menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan atas kepemilikan program senjata nuklir Korea Utara dan munculnya krisis nuklir di Semenanjung Korea.

BAB IV menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat masa Presiden Barack Obama yang telah dilakukan terkait kepemilikan senjata nuklir Korea Utara.

BAB V sebagai penutup, akan memberikan kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan yakni simpulan singkat dari Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, krisis nuklir di Semenanjung Korea, serta kebijakan luar negeri apa yang telah dilakukan Amerika Serikat khususnya pada masa Presiden Barack Obama untuk mengatasi masalah di Semenanjung Korea yang ditimbulkan oleh Korea Utara.